

Listrik Mikrohidro Murah Biaya Pokok Produksi Tidak Pernah Transparan

Pemanfaatan energi alternatif mikrohidro sampai sekarang tidak optimal. Hal ini karena penjualan listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik ramah lingkungan ini ke PLN masih dihargai relatif murah sehingga tidak pernah menguntungkan bagi setiap pengelolanya.

Kondisi ini berlawanan dengan subsidi yang diberikan pemerintah pada bahan bakar minyak fosil untuk memproduksi listrik PLN. Subsidi ini dipandang sudah tidak signifikan lagi. Sudah saatnya subsidi itu diberikan untuk pengembangan listrik dari energi alternatif yang sumbernya berlimpah di Indonesia.

Demikian dikemukakan Koordinator Tim Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) Protokol Kyoto pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Irhan Febijanto kepada Kompas, Jumat (9/5), di Jakarta.

"Pengelola pembangkit listrik dari energi alternatif oleh swasta ataupun masyarakat sama sekali tidak pernah mendapat subsidi," kata Irhan.

Dicontohkan, produk listrik dari pembangkit listrik mikrohidro yang dikelola masyarakat di Jawa Barat dijual ke PLN dengan harga Rp 432 per kilowatt (kW).

Harga itu amat murah jika dibandingkan dengan penjualan listrik tersebut oleh PLN kepada konsumen di tingkat rumah tangga, yaitu Rp 650 per kilowatt. "Listrik untuk konsumen dari PLN itu pun masih disubsidi pemerintah," kata Irhan.

Soal transparansi

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada Direktorat Jenderal Listrik dan

Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Emy Perdanahari mengatakan, ada persoalan mengenai transparansi biaya pokok produksi (BPP) listrik regional sehingga penjualan listrik dari energi alternatif kepada PLN jadi murah.

"Harga listrik swasta dan masyarakat hasil energi alternatif kalau dijual ke PLN ditetapkan harganya 80 persen BPP regional jika masuk jaringan tegangan tinggi (di atas 20 kilovolt), dan 60 persen BPP jika masuk jaringan tegangan menengah (di bawah 20 kilovolt)," ujar Emy.

Menurut Emy, nilai BPP regional di Jawa sekarang seharusnya mencapai kisaran harga Rp 900 per kW.

Dengan harga listrik mikrohidro di Jawa Rp 432 per kW, asumsinya BPP regional adalah Rp 540 per kW untuk masuk jaringan tegangan tinggi. Untuk tegangan menengah, BPP terhitung Rp 720 per kW.

Irhan mengatakan, langkah lain untuk mengoptimalkan listrik dari mikrohidro saat ini dengan memasukkan ke program CDM Protokol Kyoto. BPPT sekarang membantu lima proyek mikrohidro agar masuk CDM, berlokasi di Cileunca, Jawa Barat (1 megawatt/MW); Siteki dan Blumbungan di Banjarnegara, Jawa Tengah, masing-masing 1,2 MW dan 1,6 MW, serta Ketenger di Purwokerto, Jawa Tengah (0,5 MW); dan 2,4 MW di Rante Bala, Sulawesi Selatan. (NAW)